

Pemaknaan Sila Keempat Pancasila Dalam Partisipasi Politik Mahasiswa Stipar Ende Pada Pemilu 2024

Kristoforus Kopong^{a, 1*}

^a Sekolah Tinggi Pastoral Atma Rekso Ende, Indonesia

¹ kristokopong0505@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 Oktober 2025;

Revised: 8 November 2025;

Accepted: 24 Desember 2025.

Kata kata kunci:

Pendidikan Pancasila;

Sila Keempat;

Partisipasi Politik;

Mahasiswa;

Pendidikan Politik.

: ABSTRAK

Menjelang Pemilu 2024, pemahaman mahasiswa terhadap makna lambang dan nilai sila keempat Pancasila penting dalam membentuk partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan (1) menggambarkan pemahaman mahasiswa Stipar Ende terhadap makna lambang dan nilai sila keempat Pancasila dan (2) menganalisis keterkaitannya dengan partisipasi politik mahasiswa dalam Pemilu 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi terhadap mahasiswa Stipar Ende yang terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2024. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai sila keempat melalui kebersamaan, musyawarah, hikmat kebijaksanaan, persamaan hak, penghargaan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pemaknaan tersebut membentuk *civic disposition* berupa kesadaran, tanggung jawab, penghargaan terhadap perbedaan, dan keterbukaan dalam kehidupan demokratis, yang tercermin dalam penggunaan hak pilih, diskusi, kampanye, serta pengamatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemaknaan tersebut berkaitan dengan *civic participation* yang sadar, rasional, dan bertanggung jawab dalam Pemilu 2024.

ABSTRACT

Keywords:

Pancasila Education;

Fourth Principle;

Political Participation;

University Students;

Political Education.

The meaning of the Fourth Principle of Pancasila in the political participation of Stipar Ende students in the 2024 General Election. Ahead of the 2024 General Election, students' understanding of the bull-head symbol and the values of the fourth principle of Pancasila is important for understanding political participation. This study aims to (1) describe Stipar Ende students' understanding of the bull-head symbol and the fourth principle of Pancasila and (2) analyze its relationship with their political participation in the 2024 General Election. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation involving Stipar Ende students registered as voters. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, and validated through source and technique triangulation. The findings showed that students interpreted the fourth principle through togetherness, deliberation, wisdom, equal rights, respect for differences, and civic responsibility. This understanding contributed to students' civic disposition, reflected in awareness, responsibility, respect for differences, and openness, and manifested in voting, political discussions, campaign activities, and observing voting and vote-counting processes. These dispositions were related to conscious, rational, and responsible civic participation.

Copyright © 2025 (Kristoforus Kopong). All Right Reserved

How to Cite : Kopong, K. (2025). Pemaknaan Sila Keempat Pancasila Dalam Partisipasi Politik Mahasiswa Stipar Ende Pada Pemilu 2024. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(11), 397–407. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i11.4761>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber nilai dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia (Andriani et al., 2023). Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk kehidupan kewarganegaraan yang demokratis dan bertanggung jawab (Andriani et al., 2023; Katili, 2024). Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai Pancasila memiliki posisi penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan agar mahasiswa mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab (Andriani et al., 2023; Sunarso et al., 2024). Kehidupan kewarganegaraan tersebut menuntut warga negara memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. (Katili, 2024; Taqiuddin et al., 2023). Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif, tetapi perlu diwujudkan dalam perilaku kewarganegaraan sehari-hari. Dalam kehidupan demokratis, salah satu nilai Pancasila yang memiliki relevansi langsung dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah sila keempat (Yusdiyanto, 2016).

Pancasila memiliki lima sila yang masing-masing dilambangkan dengan simbol tertentu (Kopong, 2020). Penggunaan simbol tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya disampaikan melalui rumusan verbal, tetapi juga melalui tanda yang memiliki makna filosofis dan sosial (Kopong, 2020). Sila keempat Pancasila berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng menggambarkan hewan yang hidup berkelompok dan memiliki kecenderungan untuk berkumpul, yang kemudian dapat dihubungkan dengan karakter kehidupan masyarakat Indonesia yang mengutamakan kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama (Kopong, 2020). Secara konseptual, sila keempat tidak hanya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi juga menekankan bahwa kedaulatan tersebut dilaksanakan melalui hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Sila keempat mengandung nilai kebebasan yang bertanggung jawab, penghargaan terhadap martabat manusia, persamaan hak dan kewajiban, penghormatan terhadap perbedaan, kerja sama, musyawarah, serta mengutamakan kepentingan bersama (Yusdiyanto, 2016). Oleh karena itu, pemaknaan sila keempat tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan mengenai nilai Pancasila, tetapi juga dengan pembentukan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan demokratis.

Dalam kehidupan mahasiswa, pemahaman terhadap nilai sila keempat dapat diwujudkan melalui kegiatan diskusi, organisasi kemahasiswaan, pemilihan pengurus, penyampaian aspirasi, serta pengambilan keputusan secara musyawarah (Taqiuddin et al., 2023). Mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai warga negara muda yang memiliki hak dan tanggung jawab politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pengalaman akademik dan organisasi, mahasiswa dapat belajar menghargai perbedaan pendapat, mengembangkan sikap kritis, menerima keputusan bersama, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab (Hidayah et al., 2022). Pengalaman tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan kompetensi kewarganegaraan, karena mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) melalui praktik demokrasi dalam kehidupan nyata. Organisasi mahasiswa dapat menjadi ruang untuk mengembangkan keterampilan partisipasi melalui pengalaman langsung dalam kehidupan organisasi (Hidayah et al., 2022). Penerapan nilai sila keempat pada mahasiswa berkaitan dengan sikap demokratis, penghargaan terhadap pendapat, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan (Octavia & Rube'i, 2019). Dengan demikian, pengalaman mahasiswa dalam organisasi, diskusi, musyawarah, dan pengambilan keputusan dapat

menjadi bentuk *civic participation* yang menunjukkan penerapan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan dalam kehidupan nyata.

Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keterkaitan dalam membentuk pengalaman demokratis mahasiswa. Pendidikan Pancasila memberikan landasan nilai, sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan partisipasi kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diarahkan pada penguasaan konsep mengenai negara dan kewarganegaraan, tetapi juga pada pembentukan warga negara yang mampu menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan demokratis (Ramadhona, 2023). Dalam konteks tersebut, Pendidikan Pancasila dapat menjadi sarana pendidikan politik yang membantu mahasiswa memahami nilai, hak, dan kewajiban sebagai warga negara serta mengembangkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dikonstruksikan sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik peserta didik (Kuwoto et al., 2024). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dapat menjadi sarana pendidikan politik untuk membentuk pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara (Rahman & Suharno, 2019). Pembelajaran Pancasila dapat menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kesadaran sosial-politik mahasiswa (Alamsyah et al., 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman nilai Pancasila perlu dihubungkan dengan pengalaman dan praktik kewarganegaraan agar tidak berhenti pada penguasaan konsep secara teoretis.

Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk penting dari keterlibatan warga negara dalam kehidupan demokrasi (Budiardjo, 2008). Partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara dalam pemilu, tetapi juga dapat berupa diskusi politik, pencarian dan pertukaran informasi, kegiatan kampanye, keterlibatan dalam organisasi, penyampaian aspirasi, pengawasan, serta berbagai bentuk keterlibatan lainnya yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan publik (Budiardjo, 2008). Tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh kesadaran politik, terutama kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta penilaian masyarakat terhadap sistem dan kebijakan politik (Surbakti, 1992). Dalam konteks mahasiswa, partisipasi politik menjadi bagian dari *civic participation* karena mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi politik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan dalam kehidupan politik. Pengetahuan politik memiliki hubungan dengan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan politik, termasuk pemahaman mengenai fungsi pemilu, hak pilih, kewajiban sebagai warga negara, dan pentingnya menentukan pilihan politik secara sadar (Agus et al., 2020). Partisipasi mahasiswa juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam pemilihan umum sebagai salah satu arena praktik demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam konteks mahasiswa, partisipasi politik menjadi bagian dari *civic participation* karena mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi politik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkan *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skills* dalam kehidupan politik..

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi cara mahasiswa memperoleh dan menyampaikan informasi politik. Media sosial memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengakses informasi mengenai calon pemimpin, program politik, dan isu-isu publik, tetapi pada saat yang sama juga menjadi ruang penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, propaganda, dan polarisasi politik. Oleh karena itu, partisipasi politik mahasiswa dalam ruang digital perlu disertai kemampuan untuk mengakses, memeriksa, dan menilai informasi secara kritis. menjelaskan pentingnya penguatan literasi digital dan budaya politik generasi Z melalui pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi (Muhajir et al., 2025). Pendidikan Pancasila dapat membentuk kemampuan mahasiswa untuk menggunakan media digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, literasi digital ditempatkan sebagai konteks pendukung bagi partisipasi politik mahasiswa, bukan sebagai fokus utama penelitian. Nilai hikmat kebijaksanaan pada sila keempat dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk memeriksa kebenaran informasi, menghargai perbedaan pilihan, serta menyampaikan pendapat secara

santun dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Dengan demikian, perkembangan ruang digital semakin menegaskan pentingnya pemaknaan nilai sila keempat dalam membentuk partisipasi politik mahasiswa yang bertanggung jawab.

Di Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksha (Stipar) Ende terdapat 838 mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024. Sebagai mahasiswa, mereka telah memperoleh pembelajaran mengenai Pancasila, termasuk makna filosofis lambang dan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila. Pengetahuan tersebut seharusnya tidak hanya menjadi pemahaman akademik (*civic knowledge*), tetapi juga berkembang menjadi sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan politik, terutama melalui penggunaan hak pilih, keterlibatan dalam diskusi politik, penilaian terhadap calon pemimpin, dan penghargaan terhadap perbedaan pilihan politik. Penelitian mengenai sila keempat telah banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan nilai musyawarah, demokrasi, kesadaran politik, organisasi mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan, dan partisipasi politik. Anggraeni et al. (2026) mengkaji peran mahasiswa dalam mengembangkan kesadaran demokrasi melalui penerapan sila keempat Pancasila, sedangkan Kuwoto et al. (2024) dan Rahman dan Suharno (2019) membahas pendidikan politik melalui pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Agus et al. (2020) mengkaji hubungan pengetahuan politik dengan partisipasi politik mahasiswa, sementara Ramadhon et al. (2025) membahas partisipasi mahasiswa dalam pemilihan di lingkungan kampus. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai Pancasila, pendidikan politik, pengalaman organisasi, pengetahuan politik, dan partisipasi memiliki keterkaitan dengan pembentukan perilaku demokratis mahasiswa.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas pemaknaan sila keempat, pendidikan politik, organisasi mahasiswa, kesadaran demokrasi, dan partisipasi politik dalam fokus yang relatif terpisah. Anggraeni et al. (2026), misalnya, menekankan peran mahasiswa dalam mengembangkan kesadaran demokrasi melalui penerapan sila keempat, sedangkan Kuwoto et al. (2024) dan Rahman dan Suharno (2019) lebih menekankan pendidikan politik melalui pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Agus et al. (2020) membahas hubungan pengetahuan politik dengan partisipasi politik mahasiswa, sementara Ramadhon et al. (2025) mengkaji pengalaman partisipasi mahasiswa dalam pemilihan di lingkungan kampus. Dengan demikian, ruang yang masih perlu dikaji bukan sekadar apakah sila keempat telah diterapkan oleh mahasiswa, tetapi bagaimana mahasiswa memaknai nilai yang terkandung dalam sila keempat dan bagaimana pemaknaan tersebut tercermin dalam pengalaman mereka menggunakan hak politik, menentukan pilihan, serta menilai kualitas dan integritas calon pemimpin dalam Pemilu 2024. Posisi tersebut menjadi penting karena pemaknaan terhadap sila keempat dapat dilihat bukan hanya sebagai penguasaan pengetahuan tentang Pancasila, tetapi sebagai proses yang berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengalaman kewarganegaraan mahasiswa dalam praktik demokrasi. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan sila keempat Pancasila oleh mahasiswa Stipar Ende dan implikasinya terhadap partisipasi politik mahasiswa dalam Pemilu 2024. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana nilai kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan tanggung jawab politik dipahami dan diwujudkan mahasiswa dalam menggunakan hak politiknya pada Pemilu 2024.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implikasi pemaknaan sila keempat Pancasila terhadap partisipasi politik mahasiswa Stipar Ende dalam Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, pandangan, dan pemaknaan informan terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2018). Penelitian dilaksanakan di Stipar Ende selama Maret–April 2024. Dari 838 mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024, ditetapkan 10 mahasiswa sebagai informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria telah memiliki hak pilih, mengikuti Pemilu

2024, memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait nilai sila keempat Pancasila, dan bersedia memberikan informasi sesuai fokus penelitian (Sugiyono, 2017). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi nonpartisipatif, sedangkan dokumentasi dan literatur digunakan sebagai data pendukung. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman penelitian dengan kisi-kisi yang mencakup: (1) *civic knowledge*, berupa pemahaman informan terhadap makna sila keempat dan lambang kepala banteng; (2) *civic disposition*, berupa pengalaman menerapkan kebersamaan, musyawarah, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, persamaan hak, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan; serta (3) *civic skills* dan *civic participation*, berupa kemampuan menyampaikan pendapat, berdiskusi, mengambil keputusan bersama, dan keterlibatan dalam kegiatan yang mencerminkan partisipasi politik. Wawancara kemudian ditranskripsikan dan dikategorikan sesuai tema pemaknaan sila keempat dan partisipasi politik mahasiswa. Data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2019). Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi antar-informan serta mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kredibilitas data juga diperkuat melalui *member checking* dengan mengonfirmasi kembali informasi penting kepada informan. Pengumpulan data dihentikan setelah informasi yang diperoleh menunjukkan kejenuhan data, yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi substantif yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Stipar Ende memahami lambang sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng, sebagai simbol kehidupan bersama. Banteng dipahami sebagai hewan yang hidup berkelompok dan memiliki kebiasaan berkumpul. Pemaknaan tersebut kemudian dihubungkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengutamakan kebersamaan, kerja sama, dan kepentingan bersama. Pemahaman simbolik tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memaknai nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kepala banteng tidak hanya dipahami sebagai simbol visual sila keempat, tetapi juga sebagai representasi kehidupan sosial yang menempatkan kebersamaan dan kepentingan bersama sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan.

Pemaknaan tersebut sebagaimana terlihat dalam pernyataan Informan 1 (2024):

“Kalau saya melihat kepala banteng itu lebih kepada kebersamaan. Banteng hidup berkelompok, jadi menurut saya itu menggambarkan kita yang harus berkumpul, saling membantu, dan bekerja sama dengan orang lain.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menghubungkan simbol kepala banteng dengan pengalaman kehidupan sosial. Pemahaman simbolik berkembang menjadi kesadaran mengenai pentingnya hidup bersama, saling membantu, dan bekerja sama. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembelajaran nilai Pancasila tidak berhenti pada kemampuan mahasiswa mengenali simbol, tetapi telah berkembang pada kemampuan memberikan makna terhadap simbol berdasarkan pengalaman sosial mereka. Pemaknaan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa nilai Pancasila perlu dipahami sebagai pedoman kehidupan bersama yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku warga negara (Anggraeni et al., 2026; Yusdiyanto, 2016).

Pemaknaan kepala banteng juga berkembang pada pemahaman mengenai musyawarah dan pengambilan keputusan bersama. Mahasiswa tidak hanya melihat kehidupan bersama sebagai aktivitas berkumpul, tetapi juga sebagai proses komunikasi untuk membicarakan persoalan dan mencari keputusan yang dapat diterima bersama. Informan 2 (2024) mengungkapkan:

“Menurut saya, kepala banteng itu bukan hanya berarti hidup bersama, tetapi juga bagaimana kita berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Kalau ada masalah, kita sebaiknya berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain supaya keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya internalisasi nilai musyawarah dalam pemahaman mahasiswa terhadap sila keempat. Musyawarah dipahami sebagai proses yang melibatkan dialog, mendengarkan pendapat orang lain, dan menghasilkan keputusan bersama. Dengan demikian, makna

sila keempat tidak dipahami secara abstrak, tetapi dikaitkan dengan praktik interaksi sosial yang dialami mahasiswa. Pemahaman ini penting dalam pendidikan kewarganegaraan karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan, tetapi juga dengan kemampuan warga negara untuk berdialog, menghargai pendapat, dan menerima perbedaan (Octavia & Rube'i, 2019; Sari et al., 2025).

Internalisasi nilai musyawarah juga tampak dalam pengalaman mahasiswa mengikuti kegiatan organisasi. Organisasi mahasiswa menjadi ruang yang memungkinkan nilai sila keempat dipraktikkan melalui diskusi, penyampaian pendapat, penghargaan terhadap perbedaan, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Informan 4 (2024) mengungkapkan:

“Kalau dalam kegiatan organisasi, biasanya kami berdiskusi dulu sebelum mengambil keputusan. Setiap orang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, walaupun pendapatnya berbeda-beda. Menurut saya, perbedaan itu biasa, yang penting kita tetap saling menghargai dan akhirnya menerima keputusan yang sudah disepakati bersama.”

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa dapat menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang bersifat nyata. Mahasiswa mengalami secara langsung bagaimana kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan bersama dengan sikap menghargai pendapat orang lain. Proses tersebut memperlihatkan hubungan antara nilai musyawarah dengan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab terhadap keputusan bersama. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu memberikan pengalaman demokratis yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan nilai-nilai yang dipelajari, bukan sekadar memahaminya secara konseptual (Kuwoto et al., 2024; Rahman & Suharno, 2019).

Internalisasi nilai musyawarah selanjutnya terlihat dari kemampuan mahasiswa menerima keputusan yang berbeda dengan pendapat pribadinya. Dalam proses demokratis, penerimaan terhadap keputusan bersama merupakan bagian penting karena keputusan kolektif tidak selalu identik dengan keinginan setiap individu. Informan 6 (2024) menjelaskan:

“Dalam rapat kadang pendapat saya tidak dipakai, tetapi kalau sudah disepakati bersama, saya tetap harus menerima dan menjalankan keputusan itu. Menurut saya, yang penting kita sudah membicarakannya bersama dan keputusan itu bukan hanya keputusan satu orang.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara musyawarah dan tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Mahasiswa tidak hanya memahami hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga memahami kewajiban untuk menghormati keputusan yang telah disepakati melalui proses bersama. Sikap tersebut merupakan bentuk pembelajaran demokratis yang penting karena demokrasi mensyaratkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pengalaman seperti ini dapat membentuk *civic disposition* berupa penghargaan terhadap prosedur, kesepakatan, dan kepentingan bersama (Alamsyah et al., 2025; Ramadhon et al., 2025).

Pemahaman mengenai musyawarah kemudian memiliki keterkaitan dengan partisipasi politik mahasiswa dalam Pemilu 2024. Partisipasi politik mahasiswa tidak hanya terlihat dari kehadiran mereka di tempat pemungutan suara, tetapi juga dari kesadaran bahwa menggunakan hak pilih merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Informan 1 (2024) mengungkapkan:

“Menurut saya, ikut memilih dalam Pemilu itu penting karena kita punya hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi, kalau kita sudah punya hak pilih, sebaiknya digunakan. Bagi saya, ikut memilih juga merupakan tanggung jawab sebagai warga negara, bukan hanya sekadar datang ke TPS.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa memandang hak pilih bukan semata-mata sebagai hak individual, tetapi juga sebagai tanggung jawab kewarganegaraan. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya hubungan antara nilai sila keempat dengan perilaku politik konkret. Musyawarah dan kedaulatan rakyat tidak hanya dipahami dalam lingkungan organisasi mahasiswa, tetapi juga diterapkan melalui penggunaan hak politik dalam pemilu. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan nilai Pancasila memiliki relevansi langsung dengan pembentukan partisipasi politik mahasiswa sebagai warga negara.

Partisipasi politik mahasiswa juga ditunjukkan melalui upaya memperoleh informasi sebelum menentukan pilihan politik. Mahasiswa tidak memaknai partisipasi sebagai tindakan mencoblos semata, tetapi sebagai proses yang diawali dengan pencarian dan pertimbangan informasi. Informan 3 (2024) mengungkapkan:

“Bagi saya, ikut pemilu itu bukan hanya datang ke TPS dan mencoblos. Sebelum memilih, kita juga perlu mencari informasi tentang calon supaya pilihan kita memang berdasarkan pertimbangan sendiri dan bukan hanya mengikuti pilihan orang lain.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik mahasiswa memiliki dimensi kognitif. Keputusan politik didahului oleh proses pencarian informasi dan pertimbangan pribadi. Sikap tersebut penting karena partisipasi politik yang bermakna membutuhkan kemampuan warga negara untuk memahami informasi politik, membandingkan pilihan, dan mengambil keputusan secara sadar. Dalam konteks mahasiswa, kemampuan tersebut berkaitan erat dengan literasi politik yang menjadi bagian penting dari kompetensi kewarganegaraan (Khairunnisa et al., 2024; Abidin, 2024).

Pengalaman mahasiswa dalam memperoleh informasi politik juga dilakukan melalui diskusi dengan teman sebaya. Informan 5 (2024) mengungkapkan:

“Waktu Pemilu 2024, saya ikut mencari informasi tentang calon yang akan dipilih. Saya juga beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman tentang calon dan program mereka. Dari situ saya merasa bahwa sebagai mahasiswa kita tidak hanya ikut memilih, tetapi juga perlu mengetahui informasi politik sebelum menentukan pilihan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan pergaulan mahasiswa dapat menjadi ruang pertukaran informasi politik. Diskusi dengan teman sebaya dapat memperluas pengetahuan mengenai kandidat dan program yang ditawarkan. Namun, proses tersebut tetap memerlukan kemampuan untuk menilai informasi secara kritis agar keputusan politik tidak hanya didasarkan pada pengaruh kelompok. Oleh karena itu, literasi politik perlu ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang membantu mahasiswa membangun kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi informasi politik.

Partisipasi mahasiswa dalam Pemilu 2024 juga terlihat melalui keterlibatan dalam mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik dapat berlangsung dalam bentuk yang lebih luas daripada memberikan suara. Informan 8 (2024) mengungkapkan:

“Saya ikut mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024. Dari situ saya bisa melihat secara langsung bagaimana proses pemilu berlangsung dan bagaimana suara masyarakat dihitung. Pengalaman itu membuat saya lebih memahami bahwa sebagai mahasiswa kita juga bisa ikut terlibat dalam mengamati proses pemilu, bukan hanya datang untuk memilih.”

Pengalaman tersebut memperlihatkan adanya perkembangan pemahaman mahasiswa mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik. Mahasiswa menyadari bahwa keterlibatan dalam demokrasi dapat dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, diskusi, dan aktivitas lain yang mendukung proses demokratis. Hal ini memperluas pemaknaan partisipasi politik dari aktivitas elektoral yang bersifat individual menuju keterlibatan warga negara dalam mengawal proses demokrasi. Dengan demikian, pengalaman empiris mahasiswa dalam Pemilu 2024 dapat menjadi sumber pembelajaran yang konkret bagi pengembangan kompetensi kewarganegaraan.

Dalam menentukan pilihan politik, mahasiswa juga menunjukkan pertimbangan terhadap kualitas, visi dan misi, rekam jejak, serta integritas calon. Informan 3 (2024) mengungkapkan:

“Kalau memilih calon, saya tidak hanya melihat siapa yang paling terkenal. Saya biasanya melihat visi dan misinya, bagaimana rekam jejaknya, dan apakah orang tersebut punya integritas. Menurut saya, yang penting calon itu punya kemampuan dan benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompoknya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak semata-mata mendasarkan pilihan pada popularitas calon. Pertimbangan terhadap visi dan misi, rekam jejak, integritas, kemampuan, dan kepentingan masyarakat menunjukkan adanya upaya menggunakan pertimbangan substantif dalam

menentukan pilihan politik. Sikap tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari literasi politik yang memungkinkan mahasiswa menilai kandidat berdasarkan informasi dan pertimbangan yang relevan dengan kepentingan publik.

Pertimbangan terhadap rekam jejak dan program juga tampak dalam pernyataan Informan 10 (2024):

“Bagi saya, sebelum memilih kita harus tahu dulu calon itu seperti apa. Saya lebih melihat bagaimana rekam jejaknya, apa yang pernah dilakukan, dan apakah program yang disampaikan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, jangan sampai memilih hanya karena ikut teman atau karena sering melihat calonnya di media sosial.”

Pernyataan tersebut semakin menegaskan pentingnya kemampuan mahasiswa dalam menyaring informasi politik. Media sosial dapat menjadi sumber informasi, tetapi popularitas di media sosial tidak dengan sendirinya menjadi dasar yang memadai untuk menentukan pilihan. Mahasiswa perlu membandingkan informasi, melihat rekam jejak, dan mempertimbangkan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perkembangan komunikasi politik digital, kemampuan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital dan literasi politik secara bersamaan (Sutiyoso et al., 2022; Agus et al., 2020).

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan adanya keterhubungan antara pemaknaan simbolik kepala banteng, internalisasi nilai musyawarah, dan praktik partisipasi politik mahasiswa. Kepala banteng dipahami sebagai simbol kebersamaan; kebersamaan kemudian diwujudkan melalui musyawarah, penghargaan terhadap perbedaan, dan penerimaan keputusan bersama; selanjutnya nilai tersebut berhubungan dengan partisipasi mahasiswa dalam Pemilu 2024 melalui penggunaan hak pilih, pencarian informasi, diskusi politik, pengamatan proses pemilu, dan pertimbangan terhadap kualitas calon. Dengan demikian, pemaknaan sila keempat tidak berhenti pada *civic knowledge* berupa pengetahuan simbolik, tetapi berkembang menjadi *civic disposition* dan *civic skills* yang tercermin dalam sikap serta perilaku kewarganegaraan.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi politik mahasiswa bersifat beragam. Sebagian mahasiswa menunjukkan keterlibatan melalui penggunaan hak pilih, sementara yang lain memperluas partisipasinya melalui pencarian informasi, diskusi, pengamatan proses pemilu, dan pertimbangan kritis terhadap kandidat. Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi politik perlu dipahami sebagai spektrum perilaku kewarganegaraan, bukan sebagai satu bentuk tindakan tunggal. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pengalaman mahasiswa dalam kehidupan demokratis dapat menjadi sumber belajar untuk menghubungkan pemahaman nilai Pancasila dengan praktik partisipasi politik yang nyata (Masi et al., 2025; Anderson & Kuswanto, 2021).

Temuan penelitian memiliki implikasi pedagogis bagi pembelajaran PPKn di tingkat perguruan tinggi. Pembelajaran nilai sila keempat tidak cukup dilakukan melalui penjelasan konseptual mengenai makna musyawarah, demokrasi, dan partisipasi politik, tetapi perlu dikembangkan melalui pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skills* melalui praktik demokratis. Materi pembelajaran dapat dikaitkan dengan pengalaman mahasiswa dalam organisasi, proses pengambilan keputusan, simulasi musyawarah, studi kasus pemilu, analisis program kandidat, serta pengamatan terhadap proses demokrasi. Pendekatan tersebut memungkinkan mahasiswa menghubungkan konsep Pancasila dengan pengalaman kehidupan sosial dan politik yang mereka hadapi.

Implikasi tersebut juga dapat diwujudkan melalui strategi pembelajaran berbasis pengalaman dan studi kasus. Dosen dapat menggunakan kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, perbedaan pendapat, partisipasi politik, dan penggunaan media sosial dalam komunikasi politik sebagai bahan diskusi. Mahasiswa dapat diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, membandingkan berbagai informasi, menyampaikan argumentasi, dan merumuskan keputusan melalui proses musyawarah. Strategi demikian tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dialog, dan pengambilan keputusan yang merupakan bagian dari kompetensi kewarganegaraan (Muhajir et al., 2025; Alfauqy, 2023).

Pembelajaran juga perlu memperkuat literasi politik dan literasi digital mahasiswa. Temuan mengenai pencarian informasi calon dan pertimbangan terhadap rekam jejak menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran untuk mencari informasi sebelum menentukan pilihan. Kesadaran tersebut dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang melatih mahasiswa memeriksa sumber

informasi, membandingkan informasi politik, mengidentifikasi informasi yang tidak terverifikasi, serta menilai program dan rekam jejak kandidat berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembelajaran PPKn dapat menjadi ruang untuk membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab dalam lingkungan informasi digital (Katili, 2024; Rochmat et al., 2024).

Organisasi mahasiswa juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium demokrasi dalam pembelajaran PPKn. Pengalaman mahasiswa dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan menerima keputusan bersama menunjukkan bahwa organisasi memiliki potensi pedagogis yang kuat. Dosen dapat mengintegrasikan pengalaman tersebut ke dalam refleksi pembelajaran sehingga mahasiswa tidak hanya memahami demokrasi sebagai konsep, tetapi mampu mengidentifikasi nilai-nilai demokratis dalam pengalaman mereka sendiri. Pendekatan reflektif semacam ini dapat membantu menghubungkan pembelajaran formal di kelas dengan praktik kewarganegaraan dalam kehidupan kampus.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pengayaan materi PPKn di tingkat perguruan tinggi, khususnya pada materi Pancasila, demokrasi, partisipasi politik, musyawarah, hak dan tanggung jawab warga negara, serta literasi politik dan digital. Pengayaan tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan pengalaman nyata mahasiswa sebagai sumber belajar, menggunakan kasus-kasus pemilu sebagai bahan analisis, mengembangkan simulasi musyawarah dan pengambilan keputusan, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman partisipasi politik mahasiswa. Materi PPKn dengan demikian tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan tentang Pancasila, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokratis. Temuan ini memperkuat posisi pembelajaran PPKn di perguruan tinggi sebagai proses pendidikan yang menghubungkan pengetahuan kewarganegaraan dengan sikap, keterampilan, dan pengalaman partisipasi nyata dalam kehidupan demokrasi (Amini et al., 2025; Nastiti, 2023; Taqiuddin et al., 2023).

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, mahasiswa Stipar Ende memaknai sila keempat Pancasila sebagai nilai kerakyatan yang tercermin dalam kebersamaan, musyawarah, penghargaan terhadap perbedaan, penerimaan terhadap keputusan bersama, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Pemaknaan tersebut berkaitan dengan partisipasi politik mahasiswa dalam Pemilu 2024 yang tidak terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup pencarian informasi politik, diskusi politik, keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, serta pengamatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Secara teoretis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan menunjukkan bahwa pengalaman partisipasi politik mahasiswa dapat menjadi konteks pedagogis untuk memperkaya pembelajaran nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi. Kontribusi tersebut menegaskan bahwa pembelajaran nilai Pancasila tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi dapat mengintegrasikan pengalaman, dialog, refleksi, dan praktik demokrasi mahasiswa dalam mengembangkan nilai kerakyatan, musyawarah, penghargaan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi atau wilayah yang berbeda untuk memperoleh perspektif komparatif mengenai pemaknaan nilai Pancasila dan partisipasi politik generasi muda.

Referensi

- Abidin, R. N. (2024). Dinamika partisipasi politik pada Generasi Z: Studi kasus mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Wiyatamandala*, 4(2), 47–51. <https://doi.org/10.32493/wiyata.v4i2.43845>
- Agus, A. A., Badaruddin, S., Muhkam, M. F., & Umalia, A. D. (2020). Pengaruh pengetahuan politik terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa pada pemilihan presiden tahun 2019–2024 (Studi pada mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 15(2), 112–121. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i2.19679>
- Alamsyah, R., Firdaus, M. R., Maharani, R. A. T., Putri, D., & Abdilla, A. F. (2025). The role of

- Pancasila learning in developing socio-political awareness among P.IPS UIN Malang students. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1180–1187. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.659>
- Alfaruqy, M. Z. (2023). Identitas nasional dan keterlibatan politik pada pemilih pemula perempuan. *Psyche 165 Journal*, 16(2), 79–86. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v16i2.236>
- Amini, E., Fauzi, M., Ramdhani, T. P., Ulfaturrahmi, U., Putri, D. E., & Baskara, Z. W. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih mahasiswa Gen-Z Universitas Mataram pada Pilgub NTB 2024. *Semeton Mathematics Journal*, 2(1), 60–71. <https://doi.org/10.29303/semeton.v2i1.295>
- Anderson, I., & Kuswanto, K. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pelaksanaan hak politik pada pemilihan umum presiden tahun 2019 di Kota Jambi (Pendekatan regresi logit). *Jurnal Wacana Politik*, 6(2), 142–150. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.32242>
- Andriani, A., Maryani, E., & Affandi, I. (2023). The vital role of Pancasila values in building national character through civics education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(3), 3051–3062. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i3.4067>
- Anggraeni, A. E., Maulida, H., Ardana, Z. P., Mafrucha, Z., & Sulistianingsih, D. (2026). The role of students in developing democratic awareness: Implementation fourth principle of Pancasila. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 4(1), 74–96. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v4i1.36575>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayah, Y., Su Fen, C., Suryaningsih, A., & Mazid, S. (2022). Promoting student participation skills through student organizations. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 213–223. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53422>
- Katili, C. E. M. (2024). Peranan mahasiswa sebagai warga negara dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan sistem etika. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 8(3), 401–409. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/54016>
- Khairunnisa, K., Arbaiyah, A., Yurizon, S. T., & Elsi, S. D. (2024). Analisis penyebab mahasiswa tidak memilih pada Pemilu 2024 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 728–737. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.873>
- Kopong, K. (2020). *Pendidikan Pancasila: Bahan ajar di perguruan tinggi*. Writing Revolution.
- Kuwoto, M. A., Sudarmanti, R., & Utami, A. B. (2024). Construction of political education in learning Pancasila and citizenship in increasing students' political awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), 274–283. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.73916>
- Masi, T. K., Kamiasi, A. Y., Meok, P. Y., & Borolla, F. V. (2025). Kesadaran politik mahasiswa pemilih pemula PPKn Universitas Nusa Cendana pada Pemilu Presiden 2024. *Haumeni Journal of Education*, 5(3), 91–99. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i3.26000>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Latief, A., & Tiara, M. (2025). Strengthening digital literacy and political culture for Gen-Z through Pancasila education learning in higher education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 524–534. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.89956>
- Nastiti, D. (2023). Peran organisasi mahasiswa dalam pembentukan sikap demokratis. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.37478/jpm.v4i1.2433>
- Octavia, E., & Rube'i, A. (2019). Implementasi sila keempat berlandaskan Pancasila pada mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1), 149–164. <https://doi.org/10.31571/sosial.v6i1.1261>
- Rahman, A., & S. (2019). Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282–290. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p282-290>
- Ramadhon, M. I., Yusuf, N., & Wibowo, A. P. (2025). Analysis of political participation of FKIP students in PEMIRA UMM reviewed in the perspective of PPKn. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 6(1), 90–103. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i1.86442>
- Ramadhona, A. (2023). Citizenship education (civic education) in the era of democratization. *Academy*

- of Education Journal*, 14(2), 749–756. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1899>
- Rochmat, C. S., Nursalsabila, A., Fadlilah, H. A., & Puspitasari, L. A. (2024). Internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Gen Z dalam menghadapi kontestasi pemilihan presiden 2024. *Jurnal Trias Politika*, 8(1), 71–82. <https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.6117>
- Sari, N. E., Nurliana, V., Manullang, B. M., Lianty, D. N., Prayogi, S., & Ardana, M. R. D. (2025). Persepsi mahasiswa terhadap peran sila keempat Pancasila dalam budaya demokrasi di kampus. *Jiic: Jurnal Intelektual Insan Cendekia*, 2(4), 6217–6225. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2921>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarso, Nasiwan, Suharno, Hidayah, Y., & Saputro, J. D. (2024). Stepping towards transformation: Student political awareness through instruction the development of the 21st century political education curriculum. *Mimbar Ilmu*, 29(1), 99–106. <https://doi.org/10.23887/mi.v29i1.64132>
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutiyoso, B. U., Prihantika, I., Saputra, P. R., Fitriani, Y., & Destrilia, I. (2022). Peran mahasiswa dalam pembangunan politik di era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. *Nemui Nyimah*, 2(1), 24–29. <https://doi.org/10.23960/nm.v2i1.29>
- Taqiuddin, H. U., Mulianah, B., & Solatiah, B. (2023). Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pembelajaran nilai-nilai demokrasi Pancasila. *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan (JRIP)*, 5(1), 37–43. <https://doi.org/10.36765/jrip.v5i1.583>
- Yusdiyanto. (2016). Makna filosofis nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 259–272. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>